

Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang (1942- 1945)

Sekar Arum Ambiya ^{a, 1*}, Iyus Jasyusman

^{a,b} Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

¹ 202171011@unsil.ac.id , iyusjasyusman@unsil.ac.id

* Corresponding author

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942- 1945), 2) mengetahui perbandingan pendidikan pada masa pendudukan Belanda dan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, 3) mengetahui kemerosotan pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, serta penulisan dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini: 1) Sistem pendidikan pada periode 1942- 1945 lebih mengarah pada Pendidikan militer, karena dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan tenaga kerja dan prajurit dalam Perang Asia Timur Raya, 2) Selain itu sekolah juga diintegrasikan menjadi sejenis. Hal- hal tersebut membuat banyak siswa yang memilih untuk putus sekolah serta terjadi penurunan jumlah siswa di sekolah dasar yang turun sampai 30% dan di sekolah menengah turun sampai 90%. Perbandingan pendidikan antara Belanda dan Jepang dapat terlihat diantaranya tidak adanya diskriminasi berdasarkan status sosial di sekolah seperti masa Belanda dulu, Jepang mengintegrasikan sekolah-sekolah menjadi negeri, pada masa Belanda bahasa pengantar menggunakan bahasa Belanda dan pada masa Jepang bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di berbagai sekolah, pada masa Belanda sekolah meningkat sedangkan pada masa Jepang sekolah mengalami penurunan.

Kata Kunci: pendidikan, sekolah, pendudukan Jepang

Abstract

The purpose of this article is to: 1. know the purpose of education and the type of school during the Japanese occupation of Indonesia in 1942-1945, 2. to find out the comparison of education during the Dutch colonial occupation and education during the Japanese occupation in Indonesia, 3. to find out the decline in education during the Japanese occupation in Indonesia in 1942-1945. Writing articles using research methods according to Kuntowijoyo, namely topic selection, source collection, verification or criticism of the authenticity of historical sources, interpretation, and writing using secondary data sources. The surrender of the Dutch on March 8, 1942 made Japan aggressively propagate the motto of Hakko Ichiu or "Joint Prosperity of Greater East Asia" and implemented various policies in Indonesia, one of which was the use of education. Education in 1942-1945 in Indonesia was intended to fulfill the interests of labor and employment. Japanese soldiers in the Greater

East Asia War so that the school system puts more emphasis on military education. In addition, schools are also integrated into one type. These things make many students choose to drop out of school and there is a decline in the number of students in elementary schools which drops to 30% and in secondary schools it fell to 90%. Comparison of education between the Netherlands and Japan can be seen including the absence of discrimination based on social status in schools as in the Dutch past, Japan integrated schools into the state, in the Dutch period the language of instruction used Dutch and English. During the Japanese period, Indonesian was used as the language of instruction in various schools, during the Dutch period, schooling increased, while during the Japanese period, schooling decreased.

Keywords: education, school, Japanese occupation

PENDAHULUAN

Pengadaan sistem pendidikan disuatu negara selalu disesuaikan dengan keadaan di lingkungan suatu negara serta dengan memperhatikan perkembangan manusia. Tidak terkecuali dengan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan dapat membangun potensi dan kualitas manusia dalam suatu bangsa. Horton dan Hunt berpandangan bahwa pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah, sarana untuk mengembangkan bakat, melestarikan budaya serta menciptakan keterampilan agar dapat turut serta dalam membangun demokrasi. Idealnya, tujuan pendidikan adalah untuk memajukan kehidupan serta mengembangkan manusia supaya berpendidikan, mempunyai budi pekerti, bertanggung jawab, mandiri dan kuat secara fisik serta mental. Pendidikan bahkan telah ada sejak manusia belum mengenal tulisan. Di Indonesia sendiri, pendidikan yang terstruktur pertama kali hadir pada masa kerajaan Hindu dan Buddha (Syaharuddin & Susanto, 2019: 12). Kemudian pendidikan terus berkembang sampai dengan masa penjajahan salah satunya pada masa penjajahan Jepang.

Diketahui bahwa setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, Jepang kemudian fokus menggaungkan propagandanya dengan semboyan *Hakko Ichiu* atau semboyan “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” yang masuk ke daerah jajahan menggunakan Gerakan Tiga A (Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia) untuk menarik simpati rakyat. Sedana menyatakan bahwa selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan di Indonesia salah satunya adalah pemanfaatan bidang pendidikan. Jepang menyadari bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan propagandanya sehingga rakyat Indonesia bisa sepenuhnya berada dalam pengaruh serta genggaman Jepang. Tujuan serta isi pendidikan dimaksudkan untuk kepentingan pemerintahan Jepang dan Perang Asia Timur Raya. Kedudukan Jepang di Indonesia memberikan pengaruh yang menjurus pada kemunduran dalam bidang pendidikan namun, pemerintahan yang didasarkan pada militerisme juga membawa pengaruh positif dalam kehidupan termasuk dalam pendidikan (Wahyudi, 2017: 86).

Artikel ini berusaha untuk mengkaji mengenai sistem pendidikan atau pengajaran bangsa Indonesia masa pendudukan Jepang pada rentang tahun 1942- 1945 yang dalam pelaksanaannya berbeda dari sistem pendidikan masa penjajahan bangsa sebelumnya. Perbedaan yang paling menonjol diantaranya adalah memfokuskan pendidikan militer sehingga pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan. Pembahasan mengenai sistem pendidikan Indonesia masa pendudukan Jepang telah banyak dilakukan terutama pembahasan pendidikan Islam masa pendudukan Jepang namun, kebanyakan tulisan- tulisan yang telah ada tersebut membahas sisi positif dari pendidikan masa pendudukan Jepang dan hanya sedikit membahas mengenai perbedaannya dengan sistem penjajahan sebelumnya dan kemerosotan pendidikan yang terjadi. Misalnya kajian yang dituliskan oleh Abbas A (2018) berfokus pada kemajuan (pengaruh positif) lembaga pendidikan pada masa Jepang dan hanya sekilas membahas kemunduran sistem pendidikan yang terjadi. Dari latar belakang diatas itulah, penulis merasa perlu untuk mengkaji mengenai pendidikan pada masa pendudukan Jepang tersebut terutama mengenai perbedaannya dengan sistem pendidikan penjajahan sebelumnya serta kemerosotan- kemerosotan pendidikan yang terjadi di Indonesia sejak awal kedatangan Jepang sampai dengan tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Artikel ini fokus menampilkan mengenai pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia sejak 1942 sampai dengan 1945 yang didalamnya terdapat tujuan pendidikan, jenis sekolah, perbandingan dengan pendidikan masa penjajahan sebelumnya serta kemerosotan yang terjadi pada rentang tahun tersebut. Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 2018: 69) yang dalam penelitiannya terdapat lima tahapan dalam penelitian sejarah diantaranya pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik keaslian sumber sejarah, interpretasi, serta historiografi atau penulisan. Pemilihan topik berkaitan dengan alasan penulis mengambil atau memilih judul ini. Pengumpulan sumber berkaitan dengan pengumpulan data- data serta informasi dari beberapa buku, jurnal serta skripsi di internet. Verifikasi kritik sejarah berkaitan dengan uji keautentikan suatu sumber. Interpretasi berkaitan dengan penafsiran suatu data serta suatu fakta sejarah yang didapatkan sedangkan penulisan berkaitan penguangan segala fakta yang didapat dengan menerapkan tahapan- tahapan metode penelitian sejarah tersebut dalam bentuk tertulis atau laporan hasil penelitian.

Penulisan artikel ini menggunakan metode historis serta menggunakan teknik kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti dari buku- buku, internet, skripsi, jurnal serta media dan perangkat lain yang sejenis yang berkaitan dengan topik dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan pada masa Pendudukan Jepang

Menjelang saat-saat Jepang mulai menguasai Indonesia, Jepang mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk menutup semua jenis sekolah bekas Belanda. Hal ini dilakukan guna menghapus pengaruh Barat pada orang Indonesia. Namun kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang No. 12 pada 29 April 1942 yang mengumumkan bahwa sekolah lokal diizinkan untuk dibuka kembali.

1. Tujuan Pendidikan masa pendudukan Jepang

Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang tidak dilakukan secara terbuka dan tidak diumumkan secara luas karena sedang berlangsung Perang Dunia II yang melibatkan Jepang. Perhatian pada bidang pendidikan di Indonesia dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda, hal tersebut karena Jepang hanya fokus pada tujuan utama kemenangan perang melawan Sekutu. Meskipun minat pada pendidikan rendah, namun masih ada dampak positif yang dirasakan Indonesia meskipun secara tak langsung.

Sekolah-sekolah yang dibuka oleh Jepang dipergunakan sebagai alat propaganda anti- Barat dan sebagai perwujudan dari sekolah itu, Jepang menghimpun pemuda dari berbagai kelompok untuk membantu militernya menghadapi perang. Sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan menyediakan tenaga kerja gratis itu dikenal sebagai romusha dan membentuk prajurit semimiliter dan militer untuk kepentingan Jepang dalam memenangkan perang Pasifik (Wahyudi, 2017: 5)

Kehadiran militer Jepang membawa perubahan besar pada sistem pendidikan di Indonesia, yang tujuannya tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa penjajahan Belanda, yaitu melatih tenaga kerja dengan menggunakan sumber daya alam dan manusia. Tujuan pendidikan yang dominan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk melatih prajurit militer yang mumpuni yang siap membantu Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik. Jepang tidak memperhatikan kepentingan pribumi karena yang terpenting mereka segera mendapatkan tenaga-tenaga manusia dan pasokan bahan mentah yang dapat digunakan untuk mendukung prajurit perang Jepang. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang menjadi semakin memburuk. Ini karena tujuan Jepang mendidik anak Indonesia secara militer untuk membantu Jepang mengatasi perang Pasifik. Penurunan tersebut tercermin dari berkurangnya jumlah sekolah, jumlah siswa dan guru di sekolah akibat integrasi berbagai jenis sekolah. Selain itu, nama sekolah Belanda diganti dengan nama Jepang, seperti Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*), Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*), Sekolah Menengah Atas (*Kato Chu Gakko*) dan sekolah-sekolah lain di Indonesia (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 91).

Pemerintah pendudukan Jepang, selain menyebabkan kemunduran dalam sistem pendidikan di Indonesia, juga membawa pengaruh yang menguntungkan dibidang pendidikan dan bidang lainnya. Beberapa keadaan yang menguntungkan dari adanya kebijakan baru bidang pendidikan ini yaitu seperti perkembangan bahasa Indonesia semakin meluas di seluruh pulau, buku- buku luar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seni bela diri dan latihan perang, diskriminasi berdasarkan ras dihilangkan

sehingga masyarakat memiliki kesempatan atau peluang yang sama dalam menempuh pendidikan. Seni bela diri dan perang yang diajarkan kepada para pemuda serta para pelajar Indonesia juga dikemudian hari sangat berguna untuk perang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti bermanfaat untuk melawan Belanda datang kembali ke Indonesia pada 1945. Selain itu para pemuda yang mendapat pelatihan militer tersebut melakukan beberapa perlawanan balik misalnya pemberontakan PETA Blitar pada tahun 1945. Sistem pengajaran di Indonesia pada masa Jepang juga memberikan pelajaran yang dapat membangkitkan rasa rindu dan terhadap budaya dan semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Wahyudi, 2017: 85- 86).

2. Jenis- jenis Sekolah pada masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekolah peninggalan Belanda yang ditutup dan setelah dibuka kembali mengalami perubahan. Namun kemudian sekolah yang sebelumnya dibekukan tersebut mulai dibuka kembali secara bertahap dengan mengubah nama sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah Jepang. Pada tahun 1944, *Osamu Seirei* No. 22/ 2604 diberlakukan untuk menertibkan sekolah swasta serta memberikan kekuasaan kepada *Jawa Hokokai* untuk membuka sekolah baru sementara itu pihak swasta hanya bisa untuk membuka sekolah keahlian dan bahasa. Pendidikan diselenggarakan oleh suatu badan yang bernama *Bunkyo Kyoku* (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 95).

a. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat yang terbuka untuk semua golongan dengan lama masa belajar enam tahun. Sekolah rakyat dapat ditemukan dimana sebelumnya ada sekolah pedesaan, sekolah kelas satu, sekolah menengah (kelas dua), HIS dan ELS. Sekolah Rakyat yang pertama kali dibuka pada 1 Juni 1942 adalah *HIS Djagamonjet, Baloelweg Jatinegara* dan *HIS Gastenweg*.

b. Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Oiu Gakko*)

Setelah menempuh pendidikan di sekolah Rakyat kemudian berlanjut ke Sekolah Menengah Pertama atau *Shoto Oiu Gakko* dengan durasi studi selama 3 tahun. Baru pada bulan September 1942, setelah rehat selama lima bulan sekolah menengah baru diizinkan untuk dibuka kembali tentunya setelah segala hal yang diperlukan siap.

c. Sekolah Menengah Tinggi (*Kato Chu Gakko*)

Sekolah Menengah Tinggi (SMT) pada awalnya hanya memiliki 4 sekolah di berbagai daerah di Indonesia, yaitu: Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Kemudian pada tahun 1943 bertambah dua SMT di Bandung dan Surakarta. Sekolah ini mengajarkan pendidikan umum yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk sekolah tinggi. Mereka yang diterima di SMT adalah mereka yang berhasil lulus ujian kelulusan Sekolah Menengah Pertama negeri ini.

d. Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah menengah yang ada adalah Sekolah Pertukangan dan Sekolah Menengah Teknik. Selain itu, pada masa pendudukan Jepang, Sekolah Pelayaran dan Sekolah Pelayaran Tinggi didirikan di Cirebon.

e. Sekolah Guru (*Sihan Gakko*)

Ada tiga jenis sekolah untuk melatih calon guru atau tenaga pendidik, yaitu sekolah guru 2 tahun (*Syoto Sihan Gakko*), sekolah guru 4 tahun (*Guto Suhan Gakko*) dan sekolah guru kelas 6 tahun (*Kato Sihan Gakko*).

f. Perguruan Tinggi

Ketika Jepang memulai pendudukannya di Indonesia, lembaga perguruan tinggi yang sebelumnya berdiri pada masa pemerintah kolonial Belanda hampir sepenuhnya ditutup. Hal ini menyebabkan jumlah perguruan tinggi pada permulaan tahun 1942 sangat terbatas. Namun kemudian pada tahun 1943 pemerintah secara bertahap mulai membuka kembali perguruan tinggi di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Bogor dan Surabaya. Tahun 1943 menandai dimulainya pembukaan universitas pada masa pendudukan Jepang setelah hampir semua ditutup beberapa perguruan tinggi yang dibuka yaitu Sekolah Kedokteran Tinggi di Jakarta yang dibuka kembali pada tahun 1943. Ada juga Sekolah Kedokteran Gigi di Surabaya serta Sekolah Farmasi di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1944, Sekolah Teknik Lanjutan dibuka di Bandung, dan Kedokteran Hewan di Bogor. Kemudian pada awal tahun 1945, Akademi Pemerintahan dibuka di Jakarta.

Perbandingan Pendidikan masa Pendudukan Kolonial Belanda dan Pendidikan masa Pendudukan Jepang

1. Pendidikan masa pemerintah kolonial Belanda didasarkan pada warna kulit dan diskriminasi. Asas ini dibedakan menurut jenis dan derajatnya menurut pembagian golongan dalam masyarakat colonial yaitu golongan kulit putih Eropa, golongan oriental atau Timur (Cina dan Arab) dan golongan pribumi. Pemisahan berdasarkan kelas sosial dan status sosial tersebut ditegaskan dengan penggunaan bahasa pengantar, yaitu bahasa Belanda untuk golongan Eropa elite dan bahasa Melayu untuk golongan pribumi (Prayudi and Salindri 2015: 21).

Diskriminasi pada pendudukan Jepang dihilangkan. Sekolah- sekolah diintegrasikan dan dinegerikan. Semua SD disatukan menjadi Sekolah Rakyat. Dengan demikian tidak ada lagi pembedaan diantara warga negara karena pada hakikatnya adalah manusia yang sama (Makmur dkk., 1993: 101). Terlepas dari penegerian, tetapi beberapa sekolah swasta seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, dan sekolah bekas *zending* dan *Missie* masih dibiarkan berdiri dan berkembang namun diselenggarakan dan diatur sesuai dengan sekolah umum atau negeri. Terlepas dari niat Jepang yang menghapuskan diskriminasi hanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia, namun hal ini sangatlah bermanfaat bagi rakyat Indonesia karena membuka jalan bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

2. Lembaga pendidikan Islam atau pesantren sejak dahulu selalu berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Pembatasan juga diberlakukan terhadap guru, ulama, dan beberapa sekolah yang dianggap barbar atau liar. Berdasarkan pertimbangan penjajahan, indoktrinasi Kristen serta kekhawatiran terhadap perkembangan Islam, Belanda pernah mengeluarkan kewenangan yang sangat merugikan pendidikan Islam Indonesia, termasuk Pesantren. Pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda membentuk *Priesterraden* yang tugasnya mengawasi kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam, khususnya di lingkungan pesantren. Badan ini kemudian berhasil memberikan pengaruh pada pemerintah kolonial Belanda untuk mengeluarkan Ordonansi Guru pada tahun 1905 dan Ordonansi Guru pada tahun 1925 (Untung, 2013: 17). Sementara itu, lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah di lingkungan pemukiman atau pesantren dibebaskan dari pengawasan secara langsung pada masa pendudukan Jepang. Dengan demikian, pendidikan di pondok pesantren pada masa Jepang masih dapat berlangsung secara cukup wajar (Abbas, 2018: 66). Sikap kolonial Jepang terhadap pendidikan Islam juga ternyata lebih toleran atau lunak, sehingga ruang pendidikan lebih bebas jika dibandingkan pada masa penjajahan Belanda (Hasnida, 2017: 25).
3. Peran guru di era VOC untuk kepentingan pengajaran agama Kristen dengan mendatangkan langsung dari Belanda oleh Gereja Reformasi Amsterdam. Peran guru meningkat dimasa sistem tanam paksa pada tahun 1830, hal ini karena pemerintah kolonial Belanda membutuhkan tenaga kerja berketerampilan rendah yang mampu membaca, menulis, dan berhitung (Salindri, 2015: 11). Seorang guru pada masa pendudukan Jepang, selain untuk mendidik siswa, juga digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide *Hakko Ichiu* (Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya). Guru juga digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi propaganda kepada seluruh siswa di sekolah melalui kegiatan yang mensimulasikan budaya Jepang (Wahyudi, 2017: 92).
4. Pada intinya memang pemerintah Belanda dan Jepang mempunyai keinginan yang sama untuk mendapatkan tenaga kerja rendahan dari lulusan sekolah yang mereka dirikan. Selain menciptakan tenaga kerja rendahan, tujuan pendidikan pemerintah Belanda adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga buruh untuk kepentingan kaum pemodal Belanda. Oleh karena itu, pribumi dididik menjadi pekerja berketerampilan rendah (*unskilled workers* atau buruh kasar) yang muatan pendidikannya di sekolah yaitu hanya pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi colonial (Makmur dkk., 1993; 73- 75).
Sedangkan tujuan pendidikan masa pendudukan Jepang adalah untuk menyediakan tenaga kerja paksa gratis serta tentara untuk mendukung perang Jepang. Oleh karena itu, para siswa diwajibkan untuk menjalani latihan fisik maupun latihan militer. Jepang juga bertujuan untuk membentuk jalur propaganda Jepang "*Sendenbu*", yang misinya adalah menyebarkan ideologi baru, jalur untuk menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Hal diatas menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran

masa pendudukan Jepang telah digantikan oleh kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan (Syaharuddin & Susanto, 2019: 53).

5. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dilakukan semaksimal mungkin, sedangkan pendidikan pada masa pendudukan Jepang terus mengalami kemunduran dan berkurang karena sekolah- sekolah lama Belanda harus ditutup. Jumlah sekolah meningkat selama masa penjajahan Belanda, dari 1.584 sekolah pada tahun 1900 menjadi 21.256 sekolah pada tahun 1940. Jumlah sekolah juga meningkat 13 kali lipat dalam 40 tahun. Sementara itu, jumlah sekolah pada masa pendudukan Jepang menurun, jumlah sekolah dasar berkurang dari yang tadinya 21.500 menjadi 13.500, sekolah menengah dari yang tadinya berjumlah 850 menjadi 20 sekolah dan hanya ada 4 perguruan tinggi yang dibuka pada masa awal pendudukan Jepang.
6. Pada zaman Belanda, Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah- sekolah untuk Eropa, sedangkan sekolah-sekolah untuk pribumi menggunakan bahasa daerah. Namun, setelah pendudukan Jepang di Indonesia sejak tahun 1942, bahasa Belanda dilarang dan dihapus kemudian digantikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain itu, orang Indonesia harus belajar bahasa Jepang. Bahasa Indonesia dan Jepang digunakan sebagai bahasa pengantar dan dijadikan mata pelajaran inti. Karena kebijakan ini, bahasa Indonesia menjadi berkembang lebih luas dan pemakaiannya menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia (Makmur dkk., 1993: 102). Penggunaan bahasa Indonesia yang semakin luas juga menjadi salah satu faktor tumbunya rasa rindu akan kebudayaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dapat menumbuhkan rasa bangga, semangat nasionalisme dan sebagai bentuk bela negara.

Kemerosotan Pendidikan pada masa Pendudukan Jepang

Perkembangan pendidikan pada masa pendudukan Jepang jauh menurun dibandingkan dengan masa pemerintah kolonial Belanda. Penurunan kuantitas dan kualitas pendidikan ialah dampak negatif dari tujuan Jepang yang hanya menggunakan sumber daya alam dan manusia. Tujuan Jepang yang semata-mata mendidik anak-anak Indonesia secara militer adalah untuk membantu Jepang dalam perang Pasifik. Jepang lebih menaruh perhatian pada bidang- bidang selain pendidikan seperti pemerintahan, propaganda serta pendidikan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintahan Jepang untuk memperkaya dan mengingatkan pendidikan rakyat kurang memuaskan (Irawan & Yulianto, 2019: 2).

Sistem pendidikan Jepang untuk mencerdaskan bangsa Indonesia hanya berlangsung selama satu setengah tahun. Kemudian pada bulan September 1943, Jepang mengeluarkan kebijakan baru dengan misi Nipponisasinya yang mengajarkan rakyat Indonesia tentang latihan militer. Disebutkan juga dalam Rickfles (2007: 410) bahwa pendidikan yang lebih tinggi di Indonesia benar-benar mustahil ada selama masa perang atau masa penjajahan Jepang. Pendidikan pada tahun 1942- 1945 sangat dipengaruhi oleh organisasi dan berbagai kewenangan pemerintah Jepang yang mengharuskan siswa

untuk menjalani pelatihan militer dan mengabaikan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga hal ini mengakibatkan pendidikan berkualitas rendah dan banyak siswa memutuskan untuk putus sekolah.

Permasalahan putus sekolah pada masa pendudukan Jepang disebabkan oleh menurunnya kualitas pendidikan dan pengajaran, sehingga sebagian besar orang tua enggan menyekolahkan anak-anak mereka sampai mereka lulus dari sekolahnya walaupun sebenarnya mereka mampu atau tidak memiliki kendala dan kesulitan ekonomi. Mobilisasi atau pengerahan masyarakat atas nama perang mengakibatkan orang Indonesia diperlakukan tidak taktis. Banyak anak sekolah yang diplontosi serta sering dipukuli kepalanya. Hal ini juga yang menjadi faktor banyaknya siswa yang putus sekolah, orang tua para siswa tersebut tidak tega melihat anaknya diperlakukan buruk. Dalam Nasution (Wahyudi, 2017: 101) disebutkan bahwa setelah itu dari kalangan kaum muda muncul sekelompok kecil untuk menentang tindakan sewenang-wenang tentara Jepang. Orang Indonesia dilatih menjadi prajurit untuk membantu tentara Jepang, selain itu juga dilatih membentuk tenaga kerja seperti *romusha* dan *kinrohosi* (tenaga kerja bakti). Adanya hal tersebut membuat para orang tua menganggap jika berangkat ke sekolah hanya akan membuang waktu karena para siswa digiring untuk fokus melakukan aktivitas fisik seperti senam, upacara, berlatih baris-berbaris serta latihan perang. Dapat disimpulkan bahwa banyak siswa yang memilih untuk putus sekolah karena mutu pendidikan menjadi rendah disebabkan pemerintah mengganti kegiatan belajar pembelajaran pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan pendidikan (ilmu pengetahuan) karena lebih berorientasi pada pelatihan militer, sehingga jumlah siswa pada masa pendudukan Jepang berkurang secara signifikan.

Faktor lain yang menghambat siswa untuk menyelesaikan studinya adalah adanya kesulitan ekonomi. Pemerintah Jepang tidak seperti Belanda yang memberikan subsidi biaya pendidikan bagi orang Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Pada masa Jepang, dana pendidikan diperoleh dari kerja paksa (*romusha*). Sementara dana dikelola oleh pemerintah Jepang untuk memberikan fasilitas belajar, namun hasil kerja paksa sebagian besar digunakan untuk kepentingan militer dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk tujuan pendidikan (Wahyudi, 2017: 96).

Pada masa pendudukan Jepang, jumlah siswa SD menurun 30%, sedangkan siswa SMP menurun 90% (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 91). Jumlah sekolah dasar yang tadinya berjumlah 21.500 berkurang menjadi 13.500 sekolah, sekolah menengah yang tadinya berjumlah 850 berkurang menjadi 20 sekolah serta perguruan tinggi bekas kolonial Belanda hampir seluruhnya ditutup, sehingga jumlah universitas pada awal tahun 1942 sangat terbatas (Syaharuddin & Susanto, 2019: 56). Meskipun begitu pada tahun 1943, pemerintah secara bertahap membuka kembali perguruan tinggi sehingga jumlahnya semakin banyak.

Selain itu kemerosotan juga terjadi karena saat Jepang mulai berkuasa, tidak ada sekolah yang diizinkan untuk dibuka. Beberapa sebabnya adalah karena Jepang yang menutup semua sekolah peninggalan pemerintah kolonial Belanda supaya pengaruh Baratnya hilang dari masyarakat pribumi. Selain itu juga karena persiapan untuk hal ini belum dilakukan sebab sejak awal masih banyak kesulitan yang harus diatasi terutama dari segi guru, karena pemerintah kolonial Belanda sebelumnya tidak secara

khusus menyiapkan guru Indonesia untuk SMP apalagi SMA sehingga pada akhir masa penjajahan Belanda hanya segelintir saja guru Indonesia yang memiliki otoritas penuh untuk mengajar sekolah menengah. Hambatan lainnya yaitu menyangkut buku pelajaran yang ada kebanyakan ditulis dalam bahasa Belanda. Sedangkan pemerintah Jepang yang anti- barat melarang penggunaan Bahasa Belanda (Makmur dkk., 1993: 100). Adanya penurunan pendidikan selama pendudukan Jepang juga mengakibatkan penurunan 35% jumlah guru di sekolah dasar dan penurunan 95% di sekolah menengah. Hal ini karena gaji guru sangat rendah sedangkan mereka diberi tugas yang berat (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 91- 92). Terbatasnya jumlah guru yang mengajar siswa di sekolah membuat pemerintah mendirikan beberapa jenis sekolah guru yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dari uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa Jepang sangat “keukeuh” ingin menghilangkan segala hal yang berbau Barat dan sangat gigih untuk menyebarkan pengaruh negaranya sendiri meskipun dengan menyebarkan pengaruhnya sendiri itu berarti mereka harus siap untuk menjadi pihak yang paling direpotkan diawal untuk mempersiapkan segalanya dari nol.

Dalam pendidikan Islam, saat Jepang mulai berkuasa pada tahun 1942 seluruh ormas Islam di Indonesia yang tergabung dalam MIAI telah dibekukan, sehingga Ormas yang menyelenggarakan pendidikan mengalami kesulitan dalam pengembangan pendidikan, hal ini ditandai dengan mundurnya kegiatan belajar di pesantren, madrasah dan pengajian. Meskipun begitu madrasah di pesantren tidak diawasi langsung oleh pemerintah Jepang, sehingga pendidikan di pesantren masih dapat berlangsung secara wajar (Abbas, 2018: 66). Jepang memberikan kebebasan dan berusaha membangun hubungan yang baik dengan para ulama dilingkungan Islam untuk menarik simpati serta menggalang bantuan karena para ulama merupakan golongan yang paling banyak menentang kebijakan kolonial.

Kemudian di daerah Sambas tahun 1944 masyarakatnya berniat untuk berperang melawan Jepang. Jepang menangkap semua tokoh yang berpartisipasi dalam perlawanan dan membunuh ulama, akademisi, guru, pengusaha, politisi, tokoh masyarakat. Kejadian pembunuhan ini terjadi pada 28 Juni 1944 dan dikenal dengan Peristiwa Mandor Berdarah. Akibatnya, masyarakat Kalimantan Barat kehilangan ulama, guru dan orang terpelajar lainnya, sehingga Kalimantan Barat mengalami krisis ulama dan orang- orang terdidik (Aslan & Hifza, 2017: 182). Maka dapat disimpulkan bahwa kemerosotan pendidikan juga bisa terjadi karena perang yang menyebabkan guru atau tenaga pengajar tewas dan terjadi krisis orang-orang terdidik.

Dari segala kenyataan yang ada, dapat pula disimpulkan bahwa segala kebijakan Jepang yang dianggap positif oleh bangsa Indonesia dan berlawanan dengan kebijakan bangsa penjajah sebelumnya, ternyata tidak lebih dari sekedar taktik busuk Jepang. Taktik yang digunakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia supaya mau membantu memenuhi hasrat kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Segala kebijakan Jepang yang terlihat menguntungkan bagi bangsa Indonesia sejak awal sampai akhir masa pendudukannya hanyalah kedok belaka. Hal ini menunjukkan, tujuan pendidikan dan pengeksploitasian oleh Jepang juga tidak lebih baik dari penjajahan bangsa sebelumnya meskipun Jepang sendiri mengklaim atau mencap bahwa mereka merupakan saudara tua

Indonesia. Padahal pelaksanaan pendidikan yang baik seharusnya bisa seimbang, adil dan memberikan keuntungan bagi dua belah pihak yaitu bagi bangsa dan rakyatnya. Beruntung bangsa Indonesia kini telah merdeka dan telah dapat menyelenggarakan sendiri sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, cita- cita dan kebudayaan Indonesia.

KESIMPULAN

Setiap kegiatan penjajahan yang dilakukan oleh negara besar bertujuan untuk menguasai suatu wilayah dalam berbagai bidang dan salah satu bidangnya adalah pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang tidak dilakukan secara terbuka dan tidak diumumkan secara luas karena sedang berlangsung Perang Dunia II yang melibatkan Jepang. Perhatian pada bidang pendidikan di Indonesia dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda, hal tersebut karena Jepang hanya fokus pada tujuan utama kemenangan perang melawan Sekutu. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk melatih militer yang mumpuni yang siap membantu Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik. Selain itu sekolah- sekolah peninggalan Belanda ditutup dan saat dibuka kembali banyak terjadi perubahan. Karena tujuan pendidikan masa pendudukan Jepang hanya fokus untuk membentuk tenaga kerja dan militer yang akan dikerahkan dalam Perang, pendidikan mengalami kemerosotan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah siswa di sekolah dasar turun sampai 30%, dan di sekolah menengah penurunan signifikan sebesar 90% dan adanya penurunan 35% jumlah guru di sekolah dasar dan penurunan 95% di sekolah menengah. Meskipun begitu, adanya sistem pendidikan masa pendudukan Jepang ini memberikan beberapa dampak positif diantaranya penghapusan diskriminasi, penggunaan bahasa Indonesia yang semakin meluas diseluruh daerah di Indonesia serta peningkatan kemampuan fisik para pemuda yang berguna untuk perang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2018). Pendidikan di Indonesia Pada Masa Jepang. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam*, 4(1), 64–70.
- Aslan, & Hifza. (2017). Edukasia Islamika. *Edukasia Islamika*, 4(2), 171–188.
- Hasnida. (2017). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 237–256.
- Irawan, H., & Yulianto, E. (2019). Pendidikan Di Pulau Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(1).
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Makmur, D., Haryono, P. S., Musa, S., & S, H. (1993). *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.

- Prayudi, G., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya At 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20–34. <https://core.ac.uk/download/pdf/290559825.pdf>
- Salindri, D. (2015). Peranan Guru Pada Masa Kolonial Belanda. *HISTORIA*, 9(1).
- Syahrudin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia. In *Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat* (Vol. 53, Issue 9).
- Untung, S. (2013). Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren. *Edukasia Islamika*, 11(1).
- Wahyudi, A. (2017). Perbandingan Sistem Pendidikan Di Indonesia Pada masa Kolonial Belanda (1900-1942) Dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). In *Skripsi, Universitas Jember*.